

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

2024

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirt Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga “**Rencana Kerja Inspektorat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024**” telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena merupakan Tahun Pertama pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026, dengan tema RKPD tahun 2024 adalah “Penguatan Fungsi Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Layanan Berbasis Digital” dan yang didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Insperktorat Kota Bekasi disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun Ialu, perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi,

INSPEKTUR KOTA BEKASI

IIS WISYNUWATI, S.Sos, CRA, CRP, CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ITKO TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi	49
3.3 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat	51
3.4 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	60
BAB V PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja ITKO dan Pencapaian Rencana Strategis ITKO S.D Tahun 2022 Kota Bekasi	12
Tabel 2.2 Sasaran Srtategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022	20
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	22
Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.....	24
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	26
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	27
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	28
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70.....	29
Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Yang Mmpu Mempertahankan Prediat WBBM.....	29
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Persentae Perangkat daerah dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71	30
Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Penata Usahaan Aset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material	31
Tabel 2.12 Capaian Indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	31
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP.	32
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR) ...	32
Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	34
Tabel 2.14 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	40
Tabel 3.1 Tujuan,Sasaran,Indikator dan Target Inspektorat Daerah Kota Bekasi	50
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat	52
Tabel 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dan perhitungan maju tahun 2025	53
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja SKPD	3
Gambar 3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi	34

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) yang ditetapkan oleh kepala PD. Rancangan Renja-PD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra-PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dimasa berakhirnya kepemimpinan Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) yang menyatakan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah Provinsi” serta sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi dan mengacu kepada Rancangan RKP dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai model rencana

pembangunan daerah, disusun berdasarkan hasil kinerja (evaluasi) pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada RKPD. Sementara RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

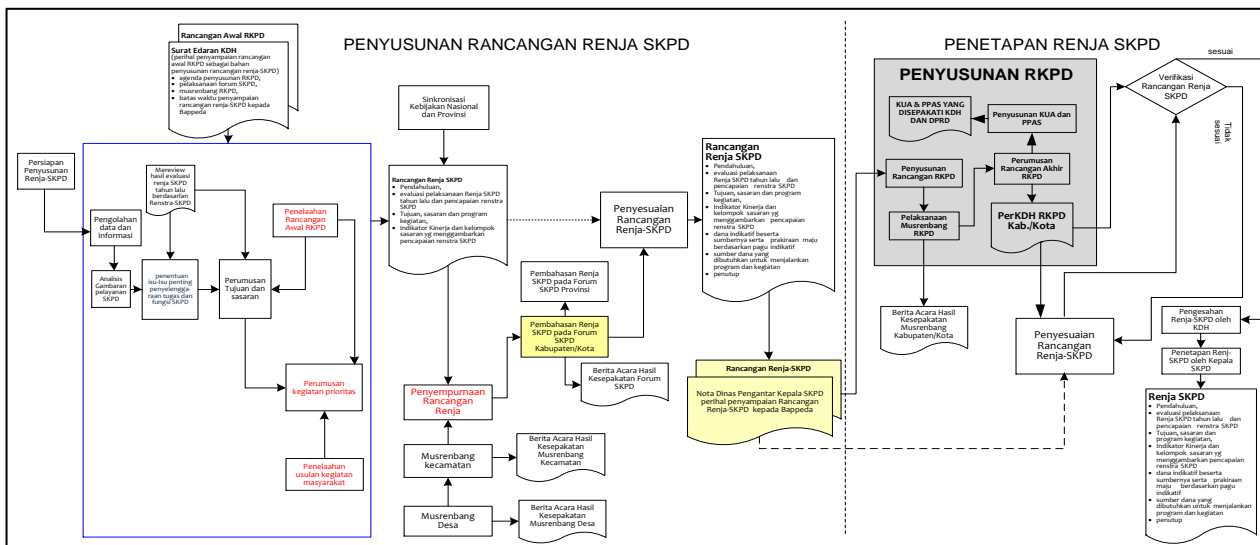
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-PD dibahas dalam forum PD yang akan diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Renja-PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-PD) kedalam rencana dan program. Renja-PD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra-PD kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Penjabaran dari Renstra-PD sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya”. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026.

Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2024 yang merupakan tahun akhir dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Proses penyusunan Renja-PD didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1.1
Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah

Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang telah disusun di tahun 2023 akan memasuki tahun pertama dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan" dan "penjaminan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (1/6/2022));
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 82 Seri D);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahuntentang kedudukan dan tugas fungsi Perangkat Daerah
33. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 050/Kep.07-Bappelitbangda/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan serta menyediakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan gambaran kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tujuan serta sasaran untuk dijadikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi;
2. Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan tahun 2024;

3. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Mendukung tercapainya RKPD Pemerintah Kota Bekasi 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi tahun lalu dan capaian kinerja terhadap Renstra.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RPD

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

B A B II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2022. Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 37,598,985,280,-.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 melaksanakan 3 Program, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Permegdagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2). Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 3). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Adapun program-program dan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp. 35,122,904,280,- didukung dengan 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan alokasi dana sebesar Rp. 1,154,248,000,- dengan 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, alokasi dana sebesar Rp. 1,321,833,000- didukung dengan 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Realisasi fisik rata-rata seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 **mencapai 98.94%** dan realisasi **keuangan 92.22%**, sehingga efisiensi biaya pada tingkat program hingga 7.78%. Persentase efisiensi tersebut dikarenakan pada level kegiatan terdapat banyak efisiensi penggunaan sumber daya di sebagian besar kegiatan dan adanya sumber daya yang tidak diserap serta kegiatan yang dihilangkan anggarannya pada APBD.

Untuk kegiatan yang dihilangkan anggarannya pada APBD Perubahan (APBD-P), tetap menghasilkan output walaupun anggarannya tidak tersedia atau anggarannya dihilangkan.

Upaya efisiensi anggaran telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD ke kantor Inspektorat dan juga melalui Daring (personal meeting) dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien dilakukan pula peningkatan kabapilitas APIP yaitu dengan memanggil narasumber ahli juga kompeten baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak swasta untuk melakukan transfer pengetahuan kepada APIP Kota Bekasi.

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 melaksanakan 3 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Program-program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.477.815.760,- terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.573.308.00- terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
- 3) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.479.675.000.- terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ITKO DAN
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS ITKO S.D TAHUN 2022
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai SAKIP Inspektorat Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas Presentase Perangkat Daerah Dengan NilaiMaturitas SPIP Minimal 3.01 Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal dan Internal	84.35 Nilai 100% 41% 92%							
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	8 Laporan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	8 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu									
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan							
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	3 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<p>Indeks Penerapan Manajemen Risiko</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SelfAssesment ZI minimal 70</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan PredikatWBK/WBBM</p> <p>Persentase PerangkatDaerah dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi Minimal 3,71</p> <p>Persentase PerangkatDaerah dengan penatausahaan aset salah saji tidak melebihi nilai material</p> <p>Persentase Perangkat Daerah dengan pertanggungjawaban keuangan salah saji tidak melebihi nilai material</p>	<p>1.97 Nilai</p> <p>5 Perangkat Daerah</p> <p>1 Perangkat Daerah</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Aplikasi	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendampingan dan Asistensi									
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	1 Dokumen	91 Dokumen	91 Dokumen	100%	91 Dokumen	91 Dokumen	100%
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1 Dokumen	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 orang/bln	95 Orang	1200 Orang/bulan	1200 Orang/bulan	100%	1200 Orang/bulan	1200 Orang/bulan	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Loporan	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	95 Orang			100%			
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	15 Bintek	41 Orang	41 Orang	100%	41 Orang	41 Orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	286 Unit	426 Unit	426 Unit	100%	426 Unit	426 Unit	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5403 Unit	3032 Unit	3032 Unit	100%	3032 Unit	3032 Unit	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1397 Unit	885 Unit	885 Unit	100%	885 Unit	885 Unit	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	64 Eksemplar	9136 Eksemplar	9136 Eksemplar	100%	9136 Eksemplar	9136 Eksemplar	100%
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		50 Kunjungan	50 Kunjungan	100%	50 Kunjungan	50 Kunjungan	100%

PARAF KOORDINASI

Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	200 Kali	300 Kali	300 Kali	100%	300 Kali	300 Kali	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan								
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit							
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165 Laporan	165 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	100%	86 Dokumen	86 Dokumen	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Rek.bulan	48 Rek/Bulan	48 Rek/Bulan	100%	48 Rek/Bulan	48 Rek/Bulan	100%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	106 Orang	120 Orang /bulan	120 Orang /bulan	100%	120 Orang /bulan	120 Orang /bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		8 Unit	8 Unit		8 Unit	8 Unit	100%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	40 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	35 Unit	35 Unit	100%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	239 Unit	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3075 M2	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Guna mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Inspektorat	84,30	84,36	100,07
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	100	95,34	95,34
		Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01	39	53.01	135.92
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	90	90.40	100.44
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80	80.00	100
		Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70	5	3	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	1	0	0
		Persentase perangkat daerah dengan nilai evaluasi persepsi korupsi minimal 3.71	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan penatausahaan aset salah saji yang tidak melebihi nilai material	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	100	100	100
2	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	3	3	100
		Indeks Penerapan Manajaemen Resiko (MR)	1,97	2,685	136,29

Sumber data : Capaian Program Indikator Tahun 2022 Perubahan RPJMD 2018-2023

Dari data tersebut di atas, bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Adanya Perubahan aturan yang mempengaruhi, namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum seluruhnya tercapai, dari target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah perangkat daerah dengan nilai evaluasi ZI Minimal 70, dikarenakan dari 17 PD yang dinilai hanya 3 PD yang memenuhi kriteria penilaian yang dipersyaratkan dalam Permenpan RB No:90/2021.

Selain itu yang tidak mencapai target adalah indikator kinerja jumlah perangkat daerah yang mampu mempertahankan predikan WBBM. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut, antara lain :

1. Karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB no: B/09/PW.03/2022 tentang seleksi administrasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2022 mensyaratkan Nilai Minimal SAKIP Pemerintah Kota minimal BB.;
2. Belum mencukupi dan memadainya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik;
3. Belum terbangunnya budaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Masih ada indikasi Gratifikasi;
5. Membangun stigma positif kepada masyarakat atas kinerja dan pelayanan

yang diberikan.

Solusi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM di Tahun 2023, antara lain :

1. Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mempertahankan predikat Wilayah mendapat Bebas Korupsi (WBK/WBBM).
2. Melakukan pendampingan terhadap pemenuhan komponen pengungkit dengan pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kelengkapan dokumen Perangkat Daerah dalam mempertahankan predikat WBK terhadap RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid agar dapat mempertahankan predikat WBK dan menjadi WBBM tahun 2023.
3. Melakukan pendampingan peningkatan komponen pengungkit kepada Perangkat daerah yang dijadikan pilot proyek pencapaian ZI menuju WBK/WBBM.
Sosialisasi secara langsung dan melalui media yang ada untuk terus menciptakan penyelenggara yang bersih (clean Governance) dan menghindari hal hal yang bertentangan seperti gratifikasi dan korupsi.

2.3.1 Nilai Sakip Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, berikut adalah capaian indikator nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi:

Tabel.2.3
Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Realisasi Tahun 2022
1	Nilai AKIP Inspektorat	84.30	84.36	100.07

Sumber: Capaian Program Indikator Tahun 2022 Perubahan RPJMD 2018-2023

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa Target dari Indikator kinerja utama Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 84.30 dengan realisasi kinerja mencapai 84.36 atau sebesar 100,07% dengan demikian hasil evaluasi

menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 84,36 (hasil dari LKE - Lembar Kinerja Evaluasi) atau kategori "A" dengan interpretasi Memuaskan.

2.3.2 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang telah dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Auditor Bidang Aparatur dan Pemerintahan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori BB ke Atas)}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel. 2.4
Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
1	2	3	4
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,60	A
2	Rumah Sakit Umum Daerah	84,53	A
3	Inspektorat Daerah	84,36	A
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84,21	A
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	82,16	A
6	Dinas Kesehatan	80,65	A
7	Dinas Tata Ruang	80,43	A
8	Sekretariat Daerah	80,42	A
9	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	80,16	A
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,16	A
11	Satuan Polisi Pamong Praja	80,07	A
12	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,93	BB
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	79,88	BB
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	79,28	BB
15	Badan Pendapatan Daerah	78,46	BB
16	Dinas Perhubungan	78,26	BB
17	Dinas Lingkungan Hidup	78,12	BB
18	Kecamatan Jatiasih	77,64	BB
19	Dinas Sosial	77,23	BB
20	Kecamatan Medan Satria	77,05	BB
21	Kecamatan Mustika Jaya	76,78	BB
22	Dinas Pendidikan	76,48	BB
23	Kecamatan Bekasi Selatan	76,42	BB
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76,41	BB
25	Dinas Pemadam Kebakaran	76,13	BB
26	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	76,12	BB
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75,60	BB
28	Kecamatan Pondokgede	75,43	BB
29	Kecamatan Jatisampurna	75,42	BB
30	Kecamatan Rawalumbu	75,38	BB
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	75,24	BB
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75,21	BB
33	Kecamatan Pondok Melati	75,09	BB
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75,01	BB
35	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	74,68	BB
36	Kecamatan Bekasi Timur	74,56	BB
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74,39	BB

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
38	Kecamatan Bantargebang	74,15	BB
39	Kecamatan Bekasi Barat	73,38	BB
40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72,25	BB
41	Kecamatan Bekasi utara	72,20	BB
42	Sekretariat DPRD	70,08	B
43	Dinas Tenaga Kerja	64,48	B
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51,89	CC

Sumber Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi AKIP yang Kategori “BB” Ke atas 2021, 95,34% dari target 100%, dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana mendapat nilai CC, Sekretariat DPRD mendapat nilai B, dan Dinas Tenaga Kerja mendapat nilai B. Ketiga Perangkat Daerah ini yang menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori “BB” Ke atas) Tahun 2022 tidak tercapai.

2.3.3 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Penyelenggaraan atas penerapan SPIP belum melibatkan seluruh OPD dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa:

1. SPIP mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risks, and Control);
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
3. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah;
4. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan: Strategi operasional dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko;
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkat kegiatan; dan
6. Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SPIP Minimal 3.01}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	39.00	53.01	135.92

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2022

Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa capaian target Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dengan capaian kinerja yang terealisasi dari target 39.00, dengan realisasi sebesar 53.01 atau 135.92 %.

2.3.4 Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

$$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Eksternal	Persen	90	90.40	100.44

Sumber: Capaian Program Indikator Tahun 2021-2023 Perubahan RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjuti atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Tindak lanjut Audit tahun 2022 terhadap pemeriksaan tahun 2021.

2.3.5 Persentase Tindaklanjuti Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2.7

Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Internal	Persen	80.00	80.00	100

Sumber: Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi

Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil rekomendasi temuan APIP tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peran APIP sebagai penjamin kualitas dan konsultan kinerja PD serta mengurangi terjadinya temuan yang berulang-ulang. Realisasi pencapaian target indikator ini bersumber dari Tindak lanjut Audit tahun 2022 terhadap pemeriksaan tahun 2021, melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2.3.6 Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70 dan Jumlah Perangkat Daerah Yang Mampu Mempertahankan Predikat WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi merupakan Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB

Tabel 2.8

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	OPD	5	3	60%

Sumber : Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi

Tabel 2.9

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM	OPD	1	0	0%

Sumber : Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi

Dari table - tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 5 OPD yang ditargetkan hanya 3 OPD yang terealisasi dan mendapat nilai ZI minimal 70 adalah RSUD Chasbullah Abdul Madjid dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta UPT PALD Kota Bekasi, disebabkan kerana dari 17 Perangkat Daerah yang dinilai hanya 3 Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria penilaian yang dipersyaratkan dalam Permenpan RB No:90/2021.

Sedangkan untuk indikator jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan Predikat WBBM, dari 1 target dan belum dapat memenuhi realisasi yang ditentukan, karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB Nomer: B/09/PW.03/2022 tentang Seleksi Administrasi ZI Menuju WBK/WBBM tahun yang mewajibkan Sakip Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan Predikat BB dan dengan nilai opini kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (WTP).

2.3.7 Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi bersama sama Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Tabel.2.10
Capaian Indikator Kinerja Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentas Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi Persepsi Anti Korupsi 3.71	persen	100	100	100%

Sumber: Capaian Program dan Indikator Program Tahun 2022 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kota Bekasi

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa capaian indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dari target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2022, maka Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pemerintah Kota Bekasi memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi, dengan kategori Bersih dari Korupsi.

2.3.8 Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material dan Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material

Saat menentukan tingkat materialitas dari suatu kesalahan penyajian, auditor juga harus mempertimbangkan seberapa besar pengaruh salah saji tersebut terhadap bagian-bagian laporan keuangan lainnya. Pengaruh semacam ini disebut sebagai tingkat resapan atau rembetan (pervasiveness). Suatu salah saji dikatakan pervasive apabila salah saji tersebut memiliki pengaruh pada akun lain.

Pertimbangan atas pervasive dapat didasarkan pada 3 faktor berikut:

1. Kompleksitas;
2. Proporsi;
3. Pengungkapan yang bersifat fundamental.

Tabel.2.11
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Penatausahaan Asset Salah Saji Yang Tidak Melebihi Nilai Material	persen	100	100	100%

Tabel.2.12
Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material	persen	100	100	100%

Dari ke dua table di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi perangkat daerah dengan penatausahaan asset salah saji yang tidak melebihi nilai material dan Persentase Perangkat Dearah Dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material sudah baik.

2.3.9 Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi consulting dan quality assurance atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Level Peningkatan Kapabilitas APIP Hasil Evaluasi oleh BPKP

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-2094/PW10/6/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah berada pada Level 3 (Delivered) dengan skor 3,00.

2.3.10 Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki kebijakan tentang penerapan manajemen risiko melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 700/Kep.381-ITKO/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen 2 Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Namun kebijakan manajemen risiko belum mengacu pada Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah daerah.

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MR)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Penerapan manajemen Risiko (MR)	Nilai	1.94	2.685	136.29

Sumber : Surat BPKP Nomor : S-1278/PW10/3.2/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021, dengan skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar 2,685 dari target 1.97 yang ditentukan pada tahun 2022 dengan demikian realisasi tahun 2022 tercapai.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA ITKO					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nilai LAKIP Inspektorat	-	-	81,55	84,18	84,25	84,3	84,35	84,2	83,32	84,36	84,35	100%	Surat Inspektorat Daerah Kota Bekasi No: 700/1072-LHE.SAKIP/IRKO.Irban UPD Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada PD tahun 2022
2.	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi AKIP BB Ke atas	-	-	98%	98%	98%	100%	100%	90%	93,18	95,35	100,00%	100%	Surat Inspektorat Daerah Kota Bekasi No: 700/1072-LHE.SAKIP/IRKO.Irban UPD Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada PD tahun 2022 Alasan : ada 3 perangkat daerah yang nilai dibawah BB (BPBD, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja)
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3,01	-	-	-%	-%	36%	39%	41%	Level 3	36,5	53,01	41%	100%	berdasarkan laporan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022
4	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	-	-	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%	92,00%	90,97%	90,52	90,40	92,00%	100%	Tindak lanjut Audit tahun 2022 terhadap pemeriksaan tahun 2021
5	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal			71%	75%	75%	80%	80%	75%	79,01%	80,00%	80%	100%	Tindak lanjut Audit tahun 2022 terhadap pemeriksaan tahun 2021

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA ITKO					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Daerah dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	-	-	-	-	5 OPD	5 OPD	5 OPD	1 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	-	karena dari 17 PD yang dinilai hanya 3 PD yang memenuhi kriteria penilaian yang dipersyaratkan dalam Permenpan RB no:90/2021
7	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mempertahankan predikat WBBM	-	-	- OPD	- OPD	0 OPD	1 OPD	1 OPD	0 OPD	1 OPD	0 OPD	1 OPD	-	Tidak tercapai karena sesuai surat pengumuman Kemenpan RB np: B/09/PW.03/2022 tentang seleksi administrasi ZI menuju WBK/WBBM tahun 2022 mensyaratkan Nililai Minimal SAKIP Pemerintah Kota minimal BB.
8	Presentase Perangkat Daerah dengan nilai Evaluasi Persepsi Korupsi Minimal 3.71	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	penilaian mandiri survey auditor inspektorat dilakukan 2 tahun sekali
9	Presentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak melebihi Nilai Material	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	90%	100%	100%	100%	Laporan Hasil Reviu Lapon Keuangan Masing Masing Perangkat Daerah
10	Presentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kesalahan Penatausahaan aset salah saji Tidak melebihi Nilai Material	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	90%	100%	100%	100%	Laporan Hasil Reviu Lapon Keuangan Masing Masing Perangkat Daerah
11	Tingkat Level Kapabilitas APIP	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Laporan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pd Inspektorat Kota Bekasi, nomor :LHP-981/PW10/6/2022
12	Nilai Penerapan Manajemen Risiko	-	-	N/A	N/A	1.94	1.97	2	1.94	2	2,685	2	100%	Surat BPKP No: S-1278/PW/3.2/2021 Perihal : Hasil Penilaian Base Line Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Berkenenaan dengan kinerja APIP yang telah dilaksanakan dan sesuai hasil analisis atas capaian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berikut kami sajikan isi-isu strategis Inspektorat Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam memberikan Early Warning System yang efektif kepada pimpinan dengan memperhatikan risiko dan keterjadian tindak pidana korupsi.
2. Reviu dan pemantauan atas proses manajemen risiko dan tindak lanjut pengendaliannya secara terjadwal. Proses manajemen risiko telah dilakukan pada tingkat strategis dan operasional, namun penerrapan atas manajemen risiko belum diterapkan secara konsisten Terhadap risiko telah juga dilakukan analisis dampak dan tingkat keterjadiannya serta telah menentukan prioritas risiko dan rencana tindak pengendaliannya. Namun rencana tindak pengendalian yang telah disusun belum efektif menurunkan risiko fraud. Selain itu pemantauan berkelanjutan juga perlu dilakukan. Proses pendampingan dan pemantauan/monitoring atas risk register di masing masing OPD telah dilakukan bersamaan dengan pada saat proses pelaksanaan audit. Namun Proses reviu dan monitoring belum dilakukan secara khusus dan terjadwal. Juga belum adanya reviu terhadap tindak lanjut penbendalian risiko tingkat strategis dan operasional secara terjadwal.
3. Perlunya tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan pada LHP BPK. Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif dan konsisten. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah APIP dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai Konsulting dan assurance terhadap OPD dalam upaya peningkatan kepedulian terhadap SPIP. Pelaksanaan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.
4. Perlunya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah. APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu penunjang yang mampu mendukung kinerja adalah kemampuan APIP dalam memahami perkembangan dan dinamika pemerintahan yakni dengan cara

peningkatan kapabilitas dan juga kompetensi. APIP berkompeten akan mampu memerikan jaminan kualitas atas hasil kerjanya.

5. Konsisten pada Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Peningkatan dan penguatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menunjang kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas APIP.
6. Mendukung perangkat daerah dalam penerapan Manajemen Risiko, melakukan Reformasi Birokrasi serta mendorong dilakukannya penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota yaitu :

1. Seringkali terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yakni antara tugas mandatori dan tugas lainnya, yang keduanya mempunyai efek yang signifikan dan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang sama.
2. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur;
3. Rendahnya kinerja aparatur dan kurang tegasnya tindakan hukuman terhadap aparat yang melakukan penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang/ pelanggaran disiplin pegawai;
4. Belum terinventarisasi aset daerah secara optimal.

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menganalisis empat faktor yaitu kekuatan (Strength), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor pengawasan. Untuk menganalisis keempat factor tersebut dibutuhkan Analisis SWOT. Analisis SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk tahun 2024 yaitu:

Kekuatan (Strength)

1. Kota Bekasi sebagai penyanggah Ibu Kota Negara memiliki akses yang strategis dengan dukungan struktur dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kompeten;
2. Struktur anggaran pembiayaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang sudah dipenuhi melalui APBD Kota Bekasi;
3. Sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas aparatur fungsional dan sekretariat telah memahami tugas pokok dan fungsi kinerja masing-masing sehingga sinergitas kinerja terbangun secara kondusif.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kelemahan (Weaknesses)

1. Belum optimalnya penerapan pelaksanaan kinerja yang akuntabel baik secara organisasi (Perangkat Daerah) maupun personal (Aparatur Sipil Negara);
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
3. Bertambah besarnya kepercayaan Pimpinan Daerah terhadap penyelesaian permasalahan pengawasan;
4. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko di Perangkat Daerah sebagai bagian dari perencanaan;
5. Adanya Conflict of Interest (CoI) adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

Peluang (Opportunities):

1. Komitmen Kepala Daerah baik dalam bentuk regulasi maupun pembiayaan untuk meningkatkan dan menguatkan kapabilitas APIP dan Akuntabilitas Kinerja;
2. Kebijakan yang mengatur tentang sistem kinerja yang akuntabel;
3. Adanya perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Bekasi pada penyediaan sarana dan prasarana, pendukung penguatan kinerja APIP;
4. Adanya peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, pelatihan baik yang dilakukan di kantor sendiri maupun dengan lembaga yang kredibel di bidangnya;
5. Terbukanya pola karier bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui beberapa kesempatan yang disediakan baik oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi sendiri, Provinsi Jawa Barat dan juga badan atau instansi di pusat seperti BPKP, LKPP, LPFA dan lain sebagainya.

2.4. *Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD*

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, tujuan 1 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel” dengan Sasaran 1.2 “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah” dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”.

Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan I Kota Bekasi 2024-2026 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dalam mencapai Indikator Kinerja Tujuan RPD Indeks Reformasi Birokrasi.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pemenuhan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Reviu terhadap Rancangan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur Daerah Kota Bekasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TABEL 2.16
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					52.533.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%			Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%		
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%		
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%		
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	13 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	13 Laporan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.010.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.010.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang/bulan	42.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang/bulan	42.000.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	2 laporan	10.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					785.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					785.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	85.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	85.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang	700.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Margajaya	Bekasi Selatan	120 Orang	700.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.315.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.315.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Paket	325.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	4 Paket	325.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Paket	300.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	400 Laporan	1.400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margajaya	Bekasi Selatan	400 Laporan	1.400.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	25 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	25 Unit	250.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.258.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.258.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	36 Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	36 Laporan	500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	750.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Laporan	750.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.850.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.850.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margajaya	Bekasi Selatan	7 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margajaya	Bekasi Selatan	12 Unit	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Margajaya	Bekasi Selatan	41 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Margajaya	Bekasi Selatan	41Unit	400.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margajaya	Bekasi Selatan	156 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margajaya	Bekasi Selatan	156 Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	5.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Unit	5.000.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.850.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.850.000.000	
		Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			80%			Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal			80%		
		Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal			91%			Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal			91%		
		Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel			100%			Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel			100%		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.400.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.400.000.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	100.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	100.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	300.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	300.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Margajaya	Bekasi Selatan	6 Laporan	250.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Margajaya	Bekasi Selatan	6 Laporan	250.000.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	200.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	200.000.000	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Kesepakatan	300.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Kesepakatan	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	250.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Dokumen	250.000.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					450.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					450.000.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	150.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	150.000.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	300.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Laporan	300.000.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.750.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.750.000.000	
		Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01			36,5			Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01			36,5		
		Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas			100%			Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas			100%		
		Level Kapabilitas APIP			Level 3			Level Kapabilitas Apip			Level 3		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					700.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					700.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Rekomendasi	500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	1 Rekomendasi	500.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	6 Rekomendasi	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Margajaya	Bekasi Selatan	6 Rekomendasi	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Target Kinerja	Pagu Indoikatif	
			Kelurahan	Kecamatan					Kelurahan	Kecamatan			
2	Pendampingan dan Asistensi					1.050.000.000	Pendampingan dan Asistensi					1.050.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Margajaya	Bekasi Selatan	6 PD	200.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Margajaya	Bekasi Selatan	6 PD	200.000.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	250.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	250.000.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Kegiatan	500.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Margajaya	Bekasi Selatan	2 Kegiatan	500.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	100.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Margajaya	Bekasi Selatan	44 PD	100.000.000	
						56.133.000.000						56.133.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak mendapat usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Tingkat Kota maupun melalui hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA BEKASI

Nama SKPD : Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

B A B III

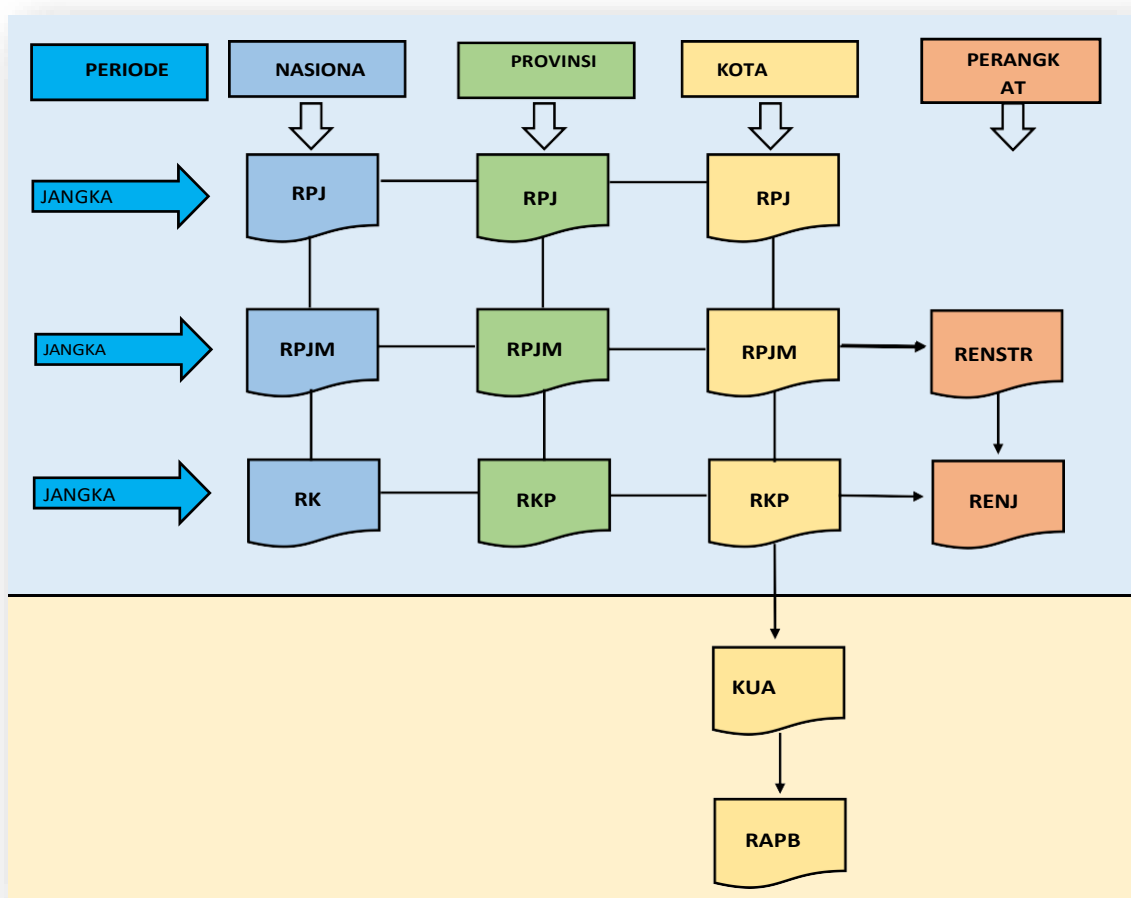
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BEKASI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Gambar 3.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi



Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan pusat/nasional karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional.

Lima fokus arahan Presiden Republik Indonesia pada kurun 2020-2024 ini yaitu :

1. Pembangunan Sumber daya manusia, dengan prioritas utama :
 - Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, trampil, menguasai iptek;
 - Mengundang kerjasama dengan dengan talenta-talenta global;
 - Mengoptimalkan kerjasama dengan insdustri; dan
 - Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan insfrastruktur, dengan prioritas utama :
 - Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama:
 - Menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama:
 - Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang Menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan kepada sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Telaahan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan nasional yaitu terkait arah kebijakan dan/atau tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sementara itu, tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024 antara lain:

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 akan mengacu pada ketentuan dalam Inmendagri No. 52 Tahun 2022. Sementara secara teknis, hubungan kedua dokumen perencanaan jangka menengah ini dan penyelarasan yang dilakukan akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Telaahan juga dilakukan Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja PD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu -isu strategis PD yang akan ditangani pada Renja PD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**, dengan indikator tujuan yaitu **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”**, dalam bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan;

- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
- 3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun identifikasi risiko;
- 5) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 6) Manajemen Anti Suap dan gratifikasi;
- 7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 8) Penanganan dan pengaduan whistleblowing system;
- 9) Penanganan benturan kepentingan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Untuk mencapai tujuan maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran yaitu: **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”**.

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	77.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Inspektorat	84.25

3.3. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan Misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel;
2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan Sasaran Tahunan Inspektorat untuk kurun waktu lima tahunan.

1. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Indikator sasaran :

1.1 Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.

2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;

Indikator sasaran :

1.1 Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya > BB.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;

Indikator sasaran :

3.1 Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.

3.2 Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang opini atas LKPD adalah WTP.

4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas;

Indikator sasaran :

4.1 Tingkat maturitas implementasi SPIP.

4.2 Nilai Indikator RAD-PPK.

5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Indikator sasaran :

Tingkat Kapabilitas APIP.

Tabel 3.2
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemehntahan daerah	1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat
		2	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	3	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
		4	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIPnya adalah BB
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	5	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat
		6	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP
4	Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas	7	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		8	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
5	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan	9	Tingkat Kapabilitas APIP

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat Perubahan 2018-2023

3.4. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Inspektorat Daerah adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan, fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”.

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
							Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				52.533.000.000				52.275.000.000
					Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%				100%	
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%				100%	
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%				100%	
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%				100%	
					Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%				100%	
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000			1 Laporan	15.000.000
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	13 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	15.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
							Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi		42.010.000.000	PAD		40.010.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	120 Orang/bulan	42.000.000.000	PAD		120 Orang/bulan 40.000.000.000	
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	2 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan 10.000.000	
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				785.000.000			865.000.000	
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	85.000.000	PAD		1 Paket 95.000.000	
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	120 Orang	700.000.000	PAD		120 Orang 770.000.000	
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.315.000.000			2.550.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	40.000.000	PAD		1 Paket 45.000.000	
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	325.000.000	PAD		4 Paket 350.000.000	
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	300.000.000	PAD		2 Paket 350.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
			Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
6 1 1 2 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	50.000.000	PAD		1 Dokumen	55.000.000
6 1 1 2 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD		1 Laporan	250.000.000
6 1 1 2 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	400 Laporan	1.400.000.000	PAD		500 Laporan	1.500.000.000
6 1 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000				360.000.000
6 1 1 2 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Unit	50.000.000	PAD		1 Unit	60.000.000
6 1 1 2 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	25 Unit	250.000.000	PAD		20 Unit	300.000.000
6 1 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.258.000.000				1.510.000.000
6 1 1 2 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	12 Laporan	8.000.000	PAD		100 Laporan	10.000.000
6 1 1 2 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	36 Laporan	500.000.000	PAD		24 Laporan	650.000.000
6 1 1 2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	750.000.000	PAD		12 Laporan	850.000.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
							Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000.000				6.965.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	7 Unit	300.000.000	PAD		12 Unit	350.000.000
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	41 Unit	400.000.000	PAD		12 Unit	450.000.000
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	156 Unit	150.000.000	PAD		200 Unit	165.000.000
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	5.000.000.000	PAD		1 Unit	6.000.000.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.850.000.000	PAD			2.075.000.000
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal		80%				80%	
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal		91%				91%	
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel		100%				100%	
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.400.000.000					1.550.000.000
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	100.000.000	PAD			120.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
			Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
6 1 2 2 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	PAD		330.000.000	
6 1 2 2 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Bekasi	6 Laporan	250.000.000	PAD		275.000.000	
6 1 2 2 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD		225.000.000	
6 1 2 2 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Bekasi	1 Kesepakatan	300.000.000	PAD		325.000.000	
6 1 2 2 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Bekasi	3 Dokumen	250.000.000	PAD		275.000.000	
6 1 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				450.000.000			525.000.000	
6 1 2 2 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Bekasi	1 Laporan	150.000.000	PAD		1 Laporan 175.000.000	
6 1 2 2 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Bekasi	1 Laporan	300.000.000	PAD		7 Laporan 350.000.000	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
							Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.750.000.000	PAD		-	1.975.000.000
						Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01		36,5				36,6	
						Level Kapabilitas APIP						Level 3	
						Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas		100%				100%	
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				700.000.000				775.000.000
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	1 Rekomendasi	500.000.000	PAD		1 Rekomendasi	550.000.000
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Bekasi	6 Rekomendasi	200.000.000	PAD		2 Rekomendasi	225.000.000
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi				1.050.000.000				1.200.000.000
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Kota Bekasi	6 Perangkat Daerah	200.000.000	PAD		3 PD	250.000.000
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bekasi	44 Perangkat Ddaerah	250.000.000	PAD		44 PD	300.000.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun (N) 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun N+1) 2025	
							Lokasi	Target	Pagu			Target	Pagu
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bekasi	2 Kegiatan	500.000.000	PAD		2 Kegiatan	500.000.000
6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bekasi	44 Perangkat Daerah	100.000.000	PAD		44 PD	150.000.000
TOTAL									56.133.000.000				56.325.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah Kota Bekasi mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan urusan pengelolaan keuangan dan aset, aparatur, pembangunan dan pelayanan publik, serta pencegahan dan investigasi.

Untuk Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 (tujuh) dan sub kegiatan sebanyak 20 (duapuluh), 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan, dan 3. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub kegiatan.

Mengikuti Aturan Peraturan Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahirabn Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini meliputi 2 kegiatan:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini meliputi 2 kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Program ini meliputi 7 kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraa n Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
						Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1	1					52.533.000.000					52.275.000.000	
						100%					100%		
						100%					100%		
						100%					100%		
						100%					100%		
						100%					100%		
6	1	1	2				15.000.000				1 Laporan	15.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan n Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah				
						Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu					
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	13 Laporan	15.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Laporan	15.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42.010.000.000					40.010.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang Bulan	110 Orang/Bul an	120 Orang/bul an	42.000.000.000	Kota Bekasi	PAD		120 Orang/bulan	40.000.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	10.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					785.000.000						865.000.000	
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	1 Paket	85.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Paket	95.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	15 Orang	120 Orang	700.000.000	Kota Bekasi	PAD		100 Orang	770.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan n Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah		
						Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu			
6	1	1	2				2.315.000.000					2.550.000.000			
6	1	1	2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Paket	45.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	325.000.000	Kota Bekasi	PAD	4 Paket	350.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	300.000.000	Kota Bekasi	PAD	2 Paket	350.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Dokumen	55.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Laporan	250.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	1.400.000.000	Kota Bekasi	PAD	500 Laporan	1.500.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah				
									Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu					
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										300.000.000			360.000.000		
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Unit	1 Unit	50.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Unit	60.000.000				Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	40 Unit	25 Unit	250.000.000	Kota Bekasi	PAD		20 Unit	300.000.000				Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.258.000.000	1.510.000.000	
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86 Laporan	165 Laporan	12 Laporan	8.000.000	Kota Bekasi	PAD		100 Laporan	10.000.000					Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	36 Laporan	500.000.000	Kota Bekasi	PAD		24 Laporan	650.000.000					Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	750.000.000	Kota Bekasi	PAD		12 Laporan	850.000.000					Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraa n Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah			
						Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu				
6	1	1	2				5.850.000.000					6.965.000.000				
6	1	1	2	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	12 Unit	7 Unit	300.000.000	Kota Bekasi	PAD	12 Unit	350.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	12 Unit	41 Unit	400.000.000	Kota Bekasi	PAD	12 Unit	450.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212 Unit	239 Unit	156 Unit	150.000.000	Kota Bekasi	PAD	200 Unit	165.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	1	2	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	Kota Bekasi	PAD	1 Unit	6.000.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasaran	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
										Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.850.000.000		PAD		2.075.000.000		
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal				80%					80%		
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal				91%					91%		
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel				100%					100%		
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.400.000.000				1.550.000.000		
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		-	4 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Kota Bekasi	PAD		120.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		4 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	300.000.000	Kota Bekasi	PAD		330.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		5 Laporan	8 Laporan	6 Laporan	250.000.000	Kota Bekasi	PAD		275.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi	PAD		225.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
						Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu	
6 1 2 2 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	300.000.000	Kota Bekasi	PAD			325.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 2 2 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	Kota Bekasi	PAD			275.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						450.000.000					525.000.000	
6 1 2 2 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		-	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Laporan	175.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 2 2 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		30 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	300.000.000	Kota Bekasi	PAD		7 Laporan	350.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan n Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
									Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu	
6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.750.000.000		PAD		-	1.975.000.000	
					Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01					36,5				36,6		
					Level Kapabilitas APIP									Level 3		
					Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas					100%				100%		
6	1	3	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						700.000.000					775.000.000	
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomenda si	1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	500.000.000	Kota Bekasi	PAD		1 Rekomendasi	550.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomenda si	2 Rekomen dasi	6 Rekomen dasi	200.000.000	Kota Bekasi	PAD		2 Rekomendasi	225.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi					1.050.000.000					1.200.000.000	
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	200.000.000	Kota Bekasi	PAD		3 PD	250.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2022	Perkiraan n Capaian Target 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelo mpok Sasar an	Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
						Target 2024	Pagu	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu	
6 1 3 2 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	250.000.000	Kota Bekasi	PAD		44 PD	300.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 3 2 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	500.000.000	Kota Bekasi	PAD		2 Kegiatan	500.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
6 1 3 2 4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		-	-	44 Perangkat Daerah	100.000.000	Kota Bekasi	PAD		44 PD	150.000.000	Inspektorat Daerah Kota Bekasi
TOTAL							56.133.000.000				-	56.325.000.000	

B A B V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk tahun kerja 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode terakhir RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif, Legislatif dan masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pemenuhan target pembangunan RPD.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* dan *outcome* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja ini melibatkan seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahirabn Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan Daerah, dengan turunan peraturan perundang-undangannya dipastikan akan mengubah model program, kodifikasi dan sistem kinerja yang dibangun dan disesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Karena itu Renja tidaklah bersifat statis tetapi dinamis yang rumusan kebijakan dan rencananya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program yang tercantum dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah pedoman kerja untuk dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan, namun demikian pada praktiknya tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran;
2. Seluruh komponen di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, yang hasilnya dijadikan bahan bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan dan kerja yang maksimal.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja juga mendukung capaian kinerja pemerintah Kota Bekasi secara komprehensif.

Bekasi,

INSPEKTUR KOTA BEKASI

IIS WISYNUWATI, S.Sos, CRA, CRP, CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002